

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era serba digitalisasi saat ini, internet telah menjadi platform komunikasi yang tidak terpisahkan bagi perusahaan untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam dunia bisnis. Perkembangan teknologi digital mendorong perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga meningkatkan transparansi informasi kepada publik. Perusahaan diharapkan mampu menyampaikan informasi keuangan maupun nonkeuangan secara cepat, relevan, serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Salah satu sarana yang banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah internet melalui praktik *Corporate Internet Reporting*.

Corporate Internet Reporting merupakan suatu praktik penyampaian informasi perusahaan kepada publik dengan memanfaatkan media internet. Melalui praktik ini, perusahaan menyajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan kinerja perusahaan, baik dalam bentuk informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang dipublikasikan melalui situs web resmi perusahaan sehingga dapat diakses dengan lebih mudah oleh para pemangku kepentingan. Di era digital, perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga diharapkan untuk mengungkapkan informasi keuangan maupun non-keuangan kepada publik secara cepat, relevan, dan mudah diakses. Tujuan utama dari *Corporate internet reporting* adalah untuk meningkatkan transparansi dan *aksesibilitas* informasi bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan, terutama *investor*. Melalui publikasi laporan keuangan, laporan tahunan, dan informasi tata kelola perusahaan pada situs web resmi, perusahaan berupaya meningkatkan transparansi serta mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan publik.

Fenomena keterlambatan pelaporan, yang merupakan indikasi utama buruknya ketepatan waktu *Corporate internet reporting*, masih menjadi

masalah signifikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), bahkan di sektor dengan visibilitas tinggi seperti Infrastruktur. Berdasarkan data BEI, setiap tahun terdapat puluhan perusahaan yang gagal mematuhi batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Auditan Tahunan (LKAT) per 31 Desember, yaitu paling lambat akhir Maret tahun berikutnya. Pada periode Laporan Keuangan Tahun 2021, BEI mencatat ada 91 perusahaan emiten yang belum menyampaikan laporan kepada publik hingga batas waktu yang ditetapkan. Angka ini kembali meningkat signifikan untuk periode Laporan Keuangan Tahun 2023, di mana terdapat 129 perusahaan tercatat yang menerima sanksi berupa peringatan tertulis I akibat belum menyampaikan laporan LKAT hingga 1 April 2024 (BEI, 2024).

Keterlambatan ini menjadi anomali, terutama pada perusahaan Sektor Infrastruktur, yang mana secara umum dicirikan oleh Ukuran Perusahaan yang besar (aset masif) dan Kepemilikan Publik yang tinggi. Berdasarkan Teori Keagenan, perusahaan besar dan yang memiliki banyak investor publik seharusnya memiliki mekanisme *governance* dan sumber daya yang memadai untuk memastikan transparansi dan ketepatan waktu. Namun, pada kenyataannya, banyak emiten di sektor ini yang justru masuk dalam daftar sanksi, yang menunjukkan adanya inefisiensi dalam pengawasan manajemen. Beberapa kasus yang menarik perhatian publik adalah keterlambatan yang berulang pada emiten yang memiliki sub-sektor terkait infrastruktur, seperti perusahaan konstruksi (TOPS) atau telekomunikasi (BTEL), yang dikenakan sanksi berupa denda hingga suspensi perdagangan saham akibat kelalaian pelaporan. Fenomena ini menciptakan *gap* penelitian yang kuat, yaitu mengapa faktor *governance* (Jumlah Dewan Komisaris) dan Ukuran Perusahaan belum mampu mendorong Ketepatan Waktu *Corporate Internet Reporting* secara efektif di sektor Infrastruktur, sehingga relevan untuk diteliti secara mendalam pada periode 2021-2025.

Tabel 1. 1 Laporan Emiten Terlambat

Tahun Laporan (Periode Akhir)	Tahun Pengumuman Sanksi	Jumlah Emiten Terlambat yang Dikenakan Sanksi
2021	Mei 2022	91
2022	Mei 2023	61
2023	April 2024	129
2024	April 2025	128

Sumber: Data diolah Penulis 2025

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan, termasuk yang tergolong dalam Sektor Infrastruktur dengan Ukuran Perusahaan yang besar dan Kepemilikan Publik yang luas, yang gagal memenuhi kewajiban fundamental terkait transparansi dan akuntabilitas publik. Kegagalan ini terlihat dari tingginya angka perusahaan yang secara konsisten dikenakan sanksi (denda hingga suspensi) oleh BEI setiap tahun karena terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan (129 emiten telat lapor LKAT 2023). Anomali ini menimbulkan pertanyaan kritis, yaitu mengapa mekanisme tata kelola internal terutama fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris serta karakteristik perusahaan yang seharusnya mendorong kepatuhan (Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Publik), ternyata belum efektif dalam menjamin Ketepatan Waktu *Corporate internet reporting* di sektor tersebut, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada investor.

Selain itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan, mulai dari peringatan tertulis hingga suspensi perdagangan saham. Secara umum, keterlambatan penyampaian laporan tahunan lebih banyak terjadi pada sektor properti, energi, dan transportasi, yang sering menghadapi kendala keuangan dan kompleksitas audit. Dengan demikian, fenomena keterlambatan tersebut menjadi hal yang penting untuk diteliti lebih lanjut, terutama terkait pengaruh faktor-faktor tata

kelola perusahaan terhadap tingkat pelaporan informasi melalui internet atau *Corporate Internet Reporting (CIR)* di Indonesia (OJK, 2025; Bursa Efek Indonesia, 2025).

Berdasarkan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, penetrasi internet tercatat sebesar 64,80%, kemudian meningkat menjadi 73,70% pada periode 2019–2020. Sedangkan tren penetrasi internet Indonesia pada 2021–2022 levelnya naik juga menjadi 77,02%. Sementara itu, tingkat penetrasi internet di Indonesia terus mengalami peningkatan pada periode 2022–2023 hingga mencapai 78,19%, atau sekitar 215.626.156 pengguna dari total populasi sebesar 275.773.901 jiwa. Kondisi tersebut membawa berbagai perubahan dalam media komunikasi, baik di kalangan masyarakat maupun dalam dunia bisnis, khususnya terkait penyampaian laporan keuangan. Dari fenomena di atas *Corporate internet reporting* merupakan hal yang menarik diteliti, oleh karena itu penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate internet reporting*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *Corporate internet reporting* adalah Kepemilikan Publik. Kepemilikan publik adalah saham yang dipunya investor individual non-manajemen. Tingkat kepemilikan saham oleh publik (investor minoritas) dapat memengaruhi tekanan terhadap perusahaan untuk meningkatkan transparansi. Dalam teori agensi, hubungan keagenan bertujuan untuk menciptakan keselarasan kepentingan antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, investor sebagai prinsipal perlu mengetahui berbagai aktivitas yang dijalankan perusahaan melalui manajer sebagai agen. Penyampaian informasi melalui publikasi laporan perusahaan diperlukan untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara kedua pihak.

Penelitian yang dilakukan (Harsanti et al., 2014) Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap *Corporate Internet Reporting*. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan publik yang tinggi cenderung menghadapi biaya keagenan yang lebih besar, sehingga mendorong manajemen untuk mengurangi biaya tersebut dengan menyampaikan informasi secara tepat waktu kepada para

pemegang saham melalui situs web perusahaan. Penelitian berbeda yang dilakukan (Rustoputri et al., 2023) Kepemilikan Publik tidak berpengaruh terhadap *Corporate Internet Reporting*. Hal ini disebabkan karena publik atau masyarakat tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendorong perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Selain itu, investor publik cenderung lebih memperhatikan besarnya dividen yang diperoleh dibandingkan ketepatan waktu *Corporate Internet Reporting*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *Corporate internet reporting* adalah jumlah komisaris independen. Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, sesama anggota Dewan Komisaris, maupun anggota Direksi. Sebagai perwakilan dari pemegang saham minoritas serta pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Komisaris Independen memiliki insentif yang lebih kuat untuk mendorong perusahaan agar lebih transparan, akuntabel dan dapat meningkatkan objektivitas dalam pengawasan terhadap kinerja manajemen dan proses pengambilan keputusan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan (Rustoputri et al., 2023) Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Corporate internet reporting*, Komisaris independen dapat mendorong perusahaan emiten untuk menyampaikan informasi keuangan secara tepat waktu. Hal ini karena komisaris independen berperan dalam penerapan prinsip-prinsip *Corporate Governance*, khususnya prinsip transparansi, yang salah satunya tercermin melalui ketepatan waktu dalam penyampaian informasi. Penelitian berbeda yang dilakukan (Valentino & Parasetya, 2022) Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Corporate Internet Reporting*. Tingginya proporsi komisaris dalam perusahaan tidak selalu mendorong pengungkapan informasi melalui situs resmi perusahaan. Hal ini disebabkan karena keberadaan komisaris perusahaan di Indonesia sering kali hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan regulasi. Selain itu, proses seleksi dan penunjukan komisaris belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan kompetensi yang memadai, sehingga peran komisaris perusahaan belum dapat berjalan secara optimal.

Faktor ketiga yang memengaruhi *Corporate internet reporting* (CIR) adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya finansial, teknologi, serta sumber daya manusia yang lebih memadai sehingga mampu menyajikan informasi melalui internet secara lebih optimal. Selain itu, perusahaan besar cenderung lebih mendapat perhatian dari publik, investor, dan regulator, sehingga memiliki dorongan yang lebih tinggi untuk menyampaikan laporan yang transparan dan akurat melalui situs web perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula tuntutan terhadap keterbukaan dan akuntabilitas informasi. Dengan demikian, ukuran perusahaan menjadikan faktor tersebut berperan penting dalam menentukan tingkat penerapan serta ketepatan waktu *Corporate Internet Reporting*.

Penelitian yang dilakukan (Norfatmawati et al., n.d.) **Ukuran Perusahaan** berpengaruh terhadap *Corporate Internet Reporting*. Perusahaan yang berukuran lebih besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai serta tingkat perhatian publik yang lebih tinggi, sehingga mendorong perusahaan untuk menyampaikan *Corporate Internet Reporting* secara lebih tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan para pemangku kepentingan. Penelitian berbeda yang dilakukan (Ningtyas, 2024) **Ukuran Perusahaan** tidak berpengaruh terhadap *Corporate Internet Reporting*. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya perusahaan. Baik perusahaan besar maupun kecil memiliki tujuan yang sama untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Ringkasan *Research Gap* Mengenai Pengaruh Kepemilikan Publik, Jumlah Dewan Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate internet reporting* terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Research Gap

Research Gap	Peneliti	Hasil Penelitian
Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap CIR	(Harsanti et al., 2014)	Berpengaruh
	Rustoputri, Okvrisha et.al (2023)	Tidak Berpengaruh
Pengaruh Jumlah Komisaris <i>Independent</i> terhadap CIR	(Rustoputri et al., 2023)	Berpengaruh
	(Valentino & Parasetya, 2022)	Tidak Berpengaruh
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap CIR	Ayu et.al (2021)	Berpengaruh
	(Ningtyas, 2024)	Tidak Berpengaruh

Sumber: diolah Penulis 2025

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut adanya perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul berikut **“PENGARUH KEPEMILIKAN PUBLIK, JUMLAH DEWAN KOMISIARIS INDEPENDEN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CORPORATE INTERNET REPORTING (Studi Empiris Perusahaan Infrakstruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka penelitian merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu:

1. Apakah Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap tingkat *Corporate Internet Reporting* (CIR)?
2. Apakah Jumlah Anggota Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap tingkat *Corporate Internet Reporting* (CIR)?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap tingkat *Corporate Internet Reporting* (CIR)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis serta memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Kepemilikan Publik terhadap *Corporate Internet Reporting (CIR)*?
- b. Untuk menganalisis serta memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris Independen terhadap *Corporate Internet Reporting (CIR)*?
- c. Untuk menganalisis serta memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Internet Reporting (CIR)*?

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan serta menjadi bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu *Corporate Internet Reporting* serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam menetapkan kebijakan terkait penyampaian informasi keuangan perusahaan dengan memahami berbagai faktor yang dapat memengaruhi ketepatan waktu *Corporate Internet Reporting*.

2. Bagi OJK

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Dampak Indonesia buat jadi bahan penilaian kasus tingkatan kepatuhan terpaut ketepatan waktu *Corporate internet reporting*.

